



RENCANA KERJA 2025

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)



 **Zappeda**
Kota Jambi

Tahun Anggaran 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan bentuk perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi dalam 1 (satu) tahun kedepan, dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah Kota Jambi dan dokumen perencanaan Bappeda Kota Jambi serta laporan capaian kinerja.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) ini, diharapkan pelaksanaan anggaran dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat tercapai sesuai kinerja yang ditetapkan, dan guna mewujudkan Bappeda Sebagai Lembaga Perencanaan yang Handal, Terpercaya dan Profesional serta bermanfaat bagi pembangunan Kota Jambi.

Jambi, Mei 2024



SUHENDRI, SH.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700404 199601 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN SEBELUMNYA	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023	
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda dalam Renstra	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Bappeda.....	23
2.3.1 Pelayanan Bappeda	24
2.3.1 Isu-isu penting dan Stragetgis	25
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Bappeda	26
2.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota Jambi.....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah.....	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	49
3.3 Program dan Kegiatan	50
3.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan	50

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	63
BAB V PENUTUP	71
5.1 Catatan Penting	71
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Tahun 2023	6
Tabel 2.2	Realisasi Renja Bappeda Kota Jambi 2023.....	7
Tabel 2.3	Capaian Realisasi IKU BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023	11
Tabel 2.4	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Bappeda Kota Jambi Tahun 2023.....	16
Tabel 2.5	(T-C.29) Review Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Relaisasi Capaian Renstra Bappeda Kota Jambi Tahun 2024.....	18
Tabel 2.6	(T-C.31) Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2025 Kota Jambi.....	31
Tabel 3.1	(T-C.33) Rumusan Rencana Program Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	53
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Jambi Tahun 2025	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Dalam menjalankan amanat tersebut, dan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terlaksanakan dengan baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), maka seluruh Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja OPD adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat daerah
- e. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

Renja Bappeda Kota Jambi Tahun 2025 disusun berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026 dan RKPD Kota Jambi Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Bappeda Kota Jambi Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 42);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pambangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 20);
12. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Nomor 027 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Bappeda Kota Jambi 2025 adalah

1. Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Jambi;
2. Menyediakan dokumen resmi bagi Bappeda Kota Jambi; dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Bappeda Kota Jambi pada tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Kota Jambi;
3. Memuat pengukuran kinerja Bappeda Kota Jambi; sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

Adapun tujuan disusunnya Renja ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Bappeda Kota Jambi yang tercantum dalam Renstra Bappeda periode 2024-2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Jambi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA JAMBI TAHUN LALU

Memuat review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kota Jambi tahun 2023 dan dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2024, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA JAMBI

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan serta sasaran Renja Bappeda Kota Jambi.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA JAMBI

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Jambi pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksana rencana tindak lanjut serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya kesediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Pada anggaran tahun 2023 Pelaksanaan Renja BAPPEDA Kota Jambi dengan total anggaran yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Jambi Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.11.776.405.100,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.10.160.979.258,- atau sebesar 86,28%, yaitu:

Tabel 2.1. Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Tahun 2023

Urusan	Anggaran		Realisasi	
	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Operasional	Belanja Modal
Perencanaan	10.668.525.673,-	415.714.697,-	9.119.884.764,- (85,48%)	398.960.000,- (95,97%)
Penelitian dan Pengembangan	692.164.730,-	0,-	642.134.494,- (92,77%)	0,- (0,0%)
Jumlah	11.360.690.403,-	415.714.697,-	9.762.019.258,- (85,93%)	398.960.000,- (95,97%)
	11.776.405.100,-		10.160.979.258,- (86,28%)	

Program dan kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2. Realisasi Renja Bappeda Kota Jambi Tahun 2023

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.539.534.235	7.314.842.020	85,66
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	436.679.084	300.210.530	68,75
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.700.896	81.391.530	98,42
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	353.978.188	218.819.000	61,82
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.885.636.481	4.501.058.691	92,13
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.476.452.651	4.118.777.481	92,01
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	353.675.354	333.278.030	94,23
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.749.256	22.043.880	85,61
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.759.220	26.959.300	90,59
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	54.498.320	54.465.800	99,94
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	54.498.320	54.465.800	99,94
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	437.652.400	249.366.159	56,98
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	117.937.500	109.520.000	92,86
1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	128.860.200	87.058.600	67,56
1.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	102.500.000	6.400.000	6,24
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88.354.700	46.387.559	52,50
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.078.762.040	851.091.158	78,90
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.871.286	85.859.975	99,99
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.505.000	50.250.000	99,50
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.102.205	231.965.200	92,75
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.818.851	52.503.150	99,40

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	0	0,00
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.223.900	11.631.300	23,16
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	535.800.000	376.196.282	70,21
1.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.940.798	42.685.251	83,79
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	368.540.585	351.910.000	95,49
1.6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	368.540.585	351.910.000	95,49
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.710.325	447.856.213	70,67
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.337.925	24.622.800	52,01
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	328.000.000	277.704.013	84,67
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.000.000	6.407.000	5,77
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.372.400	139.122.400	94,40
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.055.000	558.883.469	86,78
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	238.190.000	206.273.784	86,60
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.670.000	46.024.000	90,83
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.960.000	50.767.125	61,19
1.8.4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	60.000.000	58.566.500	97,61
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.735.000	186.077.060	94,10
1.8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.500.000	11.175.000	77,07
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.382.954.225	1.240.215.783	89,68
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	887.993.685	871.855.040	98,18
2.1.1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	379.999.928	375.764.880	98,89
2.1.2	Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	507.993.757	496.090.160	97,66

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	244.972.384	160.628.790	65,57
2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	195.000.659	123.109.615	63,13
2.2.2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	49.971.725	37.519.175	75,08
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	249.988.156	207.731.953	83,10
2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	30.196.696	14.174.100	46,94
2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	219.791.460	193.557.853	88,06
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.161.751.910	963.786.961	82,96
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	517.186.777	472.560.508	91,37
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.062.872	88.538.708	92,17
3.1.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	421.123.905	384.021.800	91,19
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	221.191.806	167.891.803	75,90
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	111.013.745	90.590.541	81,60
3.2.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	21.777.207	10.516.162	48,29
3.2.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	74.541.292	57.538.600	77,19
3.2.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	13.859.562	9.246.500	66,72
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	423.373.327	323.334.650	76,37
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	219.682.671	187.340.350	85,28

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
3.3.2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	203.690.656	135.994.300	66,77
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	692.164.730	642.134.494	92,77
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	143.479.150	127.898.774	89,14
4.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	143.479.150	127.898.774	89,14
4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	99.381.181	95.869.000	96,47
4.2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	99.381.181	95.869.000	96,47
4.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	98.949.606	98.901.101	99,95
4.3.1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	45.949.707	45.933.507	99,96
4.3.2.	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	52.999.899	52.967.594	99,94
4.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	350.354.793	319.465.619	91,18
4.4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	110.741.705	101.571.646	91,72
4.4.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	239.613.088	217.893.973	90,94
	Total :	11.776.405.100	10.160.979.258	86,28

Realisasi anggaran selama tahun 2023 sebesar 86,28% dengan silpa anggaran sebesar Rp. 1.615.425.842,-. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, ekonomis dan transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama Bappeda sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Capaian Realisasi IKU BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% CAPAIAN	Kategori
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,64	23,01	101,63%	Sangat Tinggi
		2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	16,40	19,35	117,99%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	102,95%	102,95%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Rata-rata Total Capaian					105,64%	Sangat Tinggi

Mencermati data pada tabel 2.3 maka dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja untuk mencapai Sasaran Strategis pertama yaitu Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan melampaui target. Untuk Nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP Kota mencapai 23,01 dari target 22,64 atau ekuivalen dengan capaian 101,63%. Untuk Nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP Kota realisasinya mencapai 19,35 dari target sebesar 16,40 atau setara dengan pencapaian 117,99 dari target, dengan akumulasi keberhasilan seluruhnya sebesar 109,81%.

Adapun **faktor keberhasilan** ini karena BAPPEDA Kota Jambi mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan target/indikator Sasaran Pemerintah Daerah sehingga rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan berbagai upaya perbaikan, antara lain:

- a. Bersama Inspektorat Kota Jambi dan Bagian Organisasi Setda Kota Jambi sebagai penanggungjawab capaian indikator Sasaran Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi, melaksanakan evaluasi internal atas implementasi SAKIP pada 39

Perangkat Daerah.

- b. Memperbaiki dan mereviu RPJMD Kota Jambi 2018-2023 dengan sasaran yang lebih berorientasi hasil;
- c. Melaksanakan asistensi/pembinaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja kepada Perangkat Daerah;
- d. Menyusun pedoman evaluasi AKIP internal melalui Surat Keputusan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi;

Sedangkan **faktor-faktor yang masih perlu diperhatikan** untuk mengoptimalkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Jambi pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja, antara lain:

- a) Sasaran Strategis Pemerintah Kota Jambi dan Perangkat Daerah yang berorientasi hasil dan menggambarkan kinerja yang sesuai serta memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*)
- b) Cascading/penjenjangan kinerja level Pemerintah Kota Jambi dan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan logical framework dan critical success factor, serta menggambarkan pola crosscutting kinerja antar bidang serta tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;
- c) IKU Perangkat Daerah lebih spesifik dan dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data yang relevan untuk menggambarkan capaian kinerja.
- d) Monitoring dan evaluasi yang berorientasi capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan ssebagai penentuan anggaran program dan kegiatan.

Dalam rangka menunjang pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kota Jambi, tentunya juga merupakan kewajiban BAPPEDA Kota Jambi untuk meningkatkan peran sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dengan **langkah-langkah antisipatif** yang akan diambil sebagai rencana aksi antara lain :

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan dan *cascading* kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Secara berkelanjutan meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap manajemen kinerja OPD terkait dengan perencanaan dan pengukuran kinerja, sehingga capaian nilai akuntabilitas kinerja yang sudah baik dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan;
- 3) Meningkatkan intensitas koordinasi, asistensi/pembinaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja kepada Perangkat Daerah.
- 4) Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan Inspektorat Kota Jambi dan Bagian Organisasi Setda Kota Jambi untuk mengoptimalkan capaian nilai akuntabilitas Pemerintah Kota Jambi.
- 5) Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan.

Selanjutnya, untuk pencapaian Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan belum dapat dihitung karena masih dalam tahap pengumpulan data capaian kinerja Perangkat Daerah, informasi sementara diperkirakan lebih dari 103%.

Adapun **faktor keberhasilan** ini karena berbagai upaya telah dilakukan BAPPEDA Kota Jambi mewujudkan target/indikator Sasaran Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Mengevaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah;
- b. Melakukan asistensi/pembinaan secara berkesinambungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan tahunan dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor*; dan penyusunan dokumen anggaran Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan prioritas anggaran yang mendukung pencapaian target sasaran RPJMD, target IKU Perangkat Daerah, target SPM, target SDGs maupun target IKK.

Sedangkan **faktor-faktor yang masih perlu diperhatikan** untuk mengoptimalkan capaian indikator sasaran RPJMD yaitu :

- a. Konsistensi Perangkat Daerah dalam menyusun kegiatan yang berorientasi hasil, terutama kegiatan-kegiatan pada *crosscutting* program.
- b. Memanfaatkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja sasaran dalam input perencanaan Perangkat Daerah.

Sebagai institusi yang berperan dan bertanggungjawab terhadap urusan Perencanaan Pembangunan, BAPPEDA berkewajiban untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, **langkah-langkah antisipatif** yang akan diambil sebagai rencana aksi yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan antara lain :

1. Secara berkelanjutan melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja OPD terkait dengan perencanaan dan pengukuran kinerja;
2. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan dan **cascading** kinerja Perangkat Daerah.
3. Meningkatkan intensitas koordinasi, asistensi/pembinaan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah.

Kemudian, Sasaran Startegis ketiga yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah target realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja BAPPEDA untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan telah berlangsung dengan sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi yang telah diperkirakan sebelumnya. Rata-rata total capaian yang mencapai 105,64% atau masuk dalam kategori sangat tinggi menunjukkan kapasitas kinerja yang ideal dan maksimal telah dapat diimplementasikan BAPPEDA pada tahun anggaran 2023.

Adapun faktor keberhasilan ini karena BAPPEDA Kota Jambi yang juga berperan terhadap urusan penelitian dan pengembangan, sehingga kajian kelitbang yang disusun merupakan kajian terhadap isu-isu ataupun permasalahan pembangunan di Kota Jambi yang relevan dengan kebutuhan dalam penyusunan kebijakan pada dokumen perencanaan daerah.

Sedangkan **faktor-faktor yang yang masih perlu diperhatikan** untuk

mengoptimalkan hasil kajian yaitu :

- a. Kualifikasi kompetensi tenaga ahli/konsultan yang dipilih untuk menyusun kajian;
- b. Kualitas analisis isu dan permasalahan agar lebih kritis dengan berbagai sudut pandang.

Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil sebagai rencana aksi yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan antara lain :

1. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan;
2. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Untuk melihat tingkat efisiensi dengan melakukan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi anggaran. Capaian dikatakan :

- ✓ **Efisien** jika realisasi kinerja minimal 100%, dengan angka sama atau lebih tinggi dari realisasi anggaran.
- ✓ **Tidak Efisien** jika capaian realisasi kinerja <100%, atau angkanya di bawah capaian realisasi anggaran.

Tabel 2.4. Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Bappeda Kota Jambi Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Keuangan	Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,64	23,01	101,63%	1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.161.751.910	963.786.961	82,96%	122,51%
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	16,4	19,35	117,99%	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./ Kota	8.539.534.235	7.314.842.020	85,66%	137,74%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	102,95%	102,95%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.382.954.225	1.240.215.783	89,68%	114,80%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	692.164.730	642.134.494	92,77%	107,79%
					105,64%					120,71%
Tingkat efisiensi antara capaian realisasi kinerja dengan capaian realisasi anggaran :										114,26%

Dengan demikian, dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Bappeda telah efisien, hal ini diinterpretasikan oleh 3 (tiga) indikator kinerja utama Bappeda berada pada capaian efisiensi dengan realisasi kinerja diatas 100%.

Untuk melihat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kota Jambi tahun sebelumnya dan realisasi capaian Renstra Tahun sebelumnya berikut disajikan dalam Tabel.2.5 (T-C.29).

Tabel 2.5 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Kota Jambi Tahun 2024

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Bappeda Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappeda s/d tahun berjalan (n-1)		
					Target Kinerja Renja Bappeda tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Bappeda tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
A. URUSAN PERENCANAAN											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	NILAI SAKIP BAPPEDA (Dengan Satuan:Nilai)	A	A	A	Belum dirilis Inspektorat	Belum dapat dihitung	A	Belum dirilis Inspektorat	Belum dapat dihitung	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Bappeda Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappeda s/d tahun berjalan (n-1)	
					Target Kinerja Renja Bappeda tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Bappeda tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemerintahan Daerah	Daerah (Dengan Satuan: Persen)								
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (Dengan Satuan: Persen)	100%	102,05%	100%	102,95%	102,95%	100%	Masih dilaksanakan OPD	Belum dapat dihitung
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (Dengan Satuan: Dokumen)	6	6	6	6	100%	6	6	100%
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	2	2	2	2	100%	2	2	100%
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Dgn Satuan : Laporan)	4	4	4	4	100%	4	4	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Bappeda Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappeda s/d tahun berjalan (n-1)	
					Target Kinerja Renja Bappeda tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Bappeda tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH KOMPONEN PERENCANAAN dan KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA (Dengan Satuan: Angka)	25,98 & 19,83	24,06 & 22,43	25,35 & 18,99	Belum dirilis Inspektorat	Belum dapat dihitung	25,56 & 19,27	Belum dirilis Inspektorat	Belum dapat dihitung
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Angka) Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Angka)	26,30 & 23,35	24,30 & 22,00	24,28 & 16,32	Belum dirilis Inspektorat	Belum dapat dihitung	25,38 & 22,67	Belum dirilis Inspektorat	Belum dapat dihitung
	Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Angka) Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Angka)	27,05 & 18,82	24,49 & 23,03	26,87 & 18,07	Belum dirilis Inspektorat	Belum dapat dihitung	26,93 & 18,32	Belum dirilis Inspektorat	Belum dapat dihitung
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai SAKIP Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan:	24,58 &	23,40 &	24,40 &	Belum dirilis Inspektorat	Belum dapat dihitung	24,46 &	Belum dirilis Inspektorat	Belum dapat dihitung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Bappeda Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappeda s/d tahun berjalan (n-1)		
					Target Kinerja Renja Bappeda tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Bappeda tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Angka)									
		Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Angka)	17,32	22,26	16,57			16,82			
B. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
		PROGRAM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2	Rekomendasi hasil kajian bidang bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan (Dengan Satuan: Dokumen)	2	2	100%	2	2	100%	
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2	Rekomendasi hasil kajian bidang sosial budaya dan kependudukan (Dengan Satuan: Rekomendasi)	2	2	100%	2	2	100%	
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2	Rekomendasi hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan (Dengan Satuan: Rekomendasi)	2	2	100%	2	2	100%	
		Kegiatan Pengembangan	63,25	Nilai Indeks Inovasi Daerah	62,22	62	62,36	100,58%	62	62	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (<i>out comes</i>) / Kegiatan (<i>out put</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Bappeda Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappeda s/d tahun berjalan (n-1)	
					Target Kinerja Renja Bappeda tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Bappeda tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Inovasi dan Teknologi	(Dengan Satuan: Angka)								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi tidak memiliki indikator kinerja NSPK dan SPM ataupun IKK sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian Tabel T-C.30 sebagaimana Permendagri 86 Tahun 2017, tidak perlu ditampilkan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Jambi, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kota Jambi, yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan kurun waktu dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026. Dengan demikian Bappeda juga turut bertanggung-jawab dalam memberikan penguatan perencanaan pembangunan pada perangkat daerah, sehingga perencanaan yang dihasilkan berorientasi hasil, selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Oleh karena itu, Bappeda Kota Jambi menetapkan indikator Tujuan jangka menengah dalam Renstra 2024-2026 yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan”. Penjelasan cara penentuan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja Tujuan akan disajikan pada Bab III.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

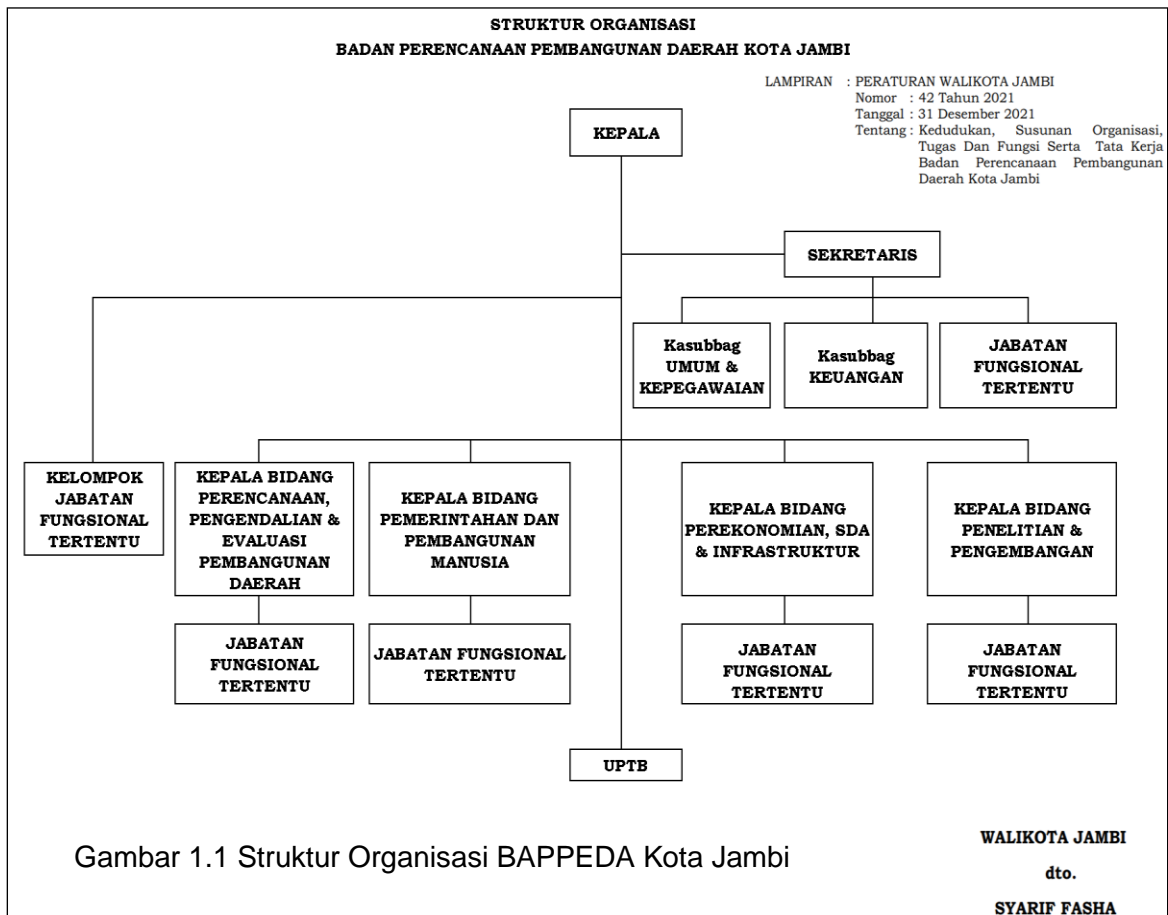
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Jambi tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Isu utama adalah adanya potensi resesi global yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan pelayanan dan pencapaian target kinerja. Sedangkan isu internal yaitu masih rendahnya kualitas perencanaan sehingga perlu ditingkatkan. Hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan

Bappeda Kota Jambi sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

2.3.1. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 tersebut bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi bertugas

membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan program penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi difokuskan pada pelayanan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah yang dapat meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting dan Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

1. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
2. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait perencanaan pembangunan daerah, menuntut sumber daya aparatur

pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

3. Adayatif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat;
4. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
5. Peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan sesuai rencana dan berhasil guna kesejahteraan masyarakat.
6. Optimalisasi sistem yang berbasis teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
7. Peningkatan peran Bappeda sebagai katalisator pembangunan daerah; dan
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil yang saat ini belum memadai untuk melaksanakan beban kerja.

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan Bappeda Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a) Masih diperlukannya sinergitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
- b) Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus terus dioptimalkan untuk meminimalisasi deviasi. Diperlukan berbagai inovasi dan strategi mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan percepatan pencapaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan pada awal periode perencanaan;
- c) Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada PD. Tingkat kapasitas pemahaman terkait proses dan substansi perencanaan di setiap level pada OPD masih belum optimal;
- d) Masih di perlukannya penguatan data untuk mendukung proses

perencanaan, meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik;

Selain permasalahan tersebut, sebagai sebuah institusi yang menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh perangkat daerah dalam jajaran Pemerintahan Kota Jambi, terutama dalam hal koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, sangat dibutuhkan tenaga perencana (*planner*) yang mampu menganalisa berbagai faktor pembangunan daerah guna terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang baru yang bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi.

Untuk menjalankan fungsi Koordinasi tersebut, sangat dibutuhkan tenaga perencana (*planner*) yang mampu menganalisa berbagai faktor pembangunan daerah guna terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang baru yang bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi.

Adapun permasalahan lainnya pada sumberdaya aparatur yang ada tersebut, antara lain :

- a. Dengan adanya penyetaran jabatan dari Eselon IV menjadi Fungsional Perencana, dimana dari 13 orang Eselon IV beralih menjadi JFT Perencana saat ini tinggal 10 orang, karena 3 orang lainnya dipromosikan dalam Jabatan Administrator (Kabid).
- b. Seluruh JFT Perencana tersebut tidak mempunyai basic pendidikan perencanaan dan belum pernah mengikuti diklat perencanaan.
- c. Seyogyanya setiap bidang setidaknya memiliki 2 atau 3 orang PNS staf teknis. Kondisi saat ini, hanya dibantu TKK untuk pelaksanaan tugas koordinasi dengan mitra kerja perangkat daerah. Sedangkan PNS staf

umum saat ini hanya terkonsentrasi pada pekerjaan pengelola keuangan kegiatan saja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB-ABK).

Sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah menyusun sampai dengan tahun 2028, dan telah disampaikan usulan formasi kebutuhan PNS kepada Walikota Jambi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi.

Meskipun pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2023 untuk Bappeda Kota Jambi baru diakomodir sebanyak 15 orang PPPK terdiri dari 1 (satu) orang JF Perencana Ahli Pratama, 1 (satu) orang JF Analis SDM Aparatur Ahli Pratama, 2 (dua) orang JF Analis Kebijakan Ahli Pratama, 1 (satu) orang JF Pranata Humas Ahli Pratama, dan 9 (sembilan) orang JF Arsiparis Terampil, namun beberapa kebutuhan tenaga teknis lainnya belum dapat terpenuhi dan diusulkan untuk formasi 2024.

Maka dari itu, sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan melalui kebijakan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam rangka memperkuat kapasitas perencanaan pembanguna dan pengembangan daerah antara lain:

1. Meningkatkan SDM Perencanaan melalui Diklat Teknis ataupun Bimbingan Teknis Perencanaan,
2. Memperkuat Koordinasi dengan lembaga pemerintahan dan stakeholder,
3. Meningkatkan peran serta perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan kreatifitas / inovasi

2.3.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya pemahaman tentang perencanaan bagi Perangkat Daerah.
- b) Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah.
- c) Peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan.
- d) Komitmen perencanaan dengan OPD.
- e) Dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a) Adanya Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Kota Jambi.
- b) Adanya dokumen RPJP, RPD dan RKPD.
- c) Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang.
- d) Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

- e) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
- f) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- g) Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
- h) Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
- i) Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- j) Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.

BAPPEDA menyadari bahwa masih lemahnya koordinasi dalam beberapa bidang untuk perbaikan di masa yang akan datang, sehingga program dan kegiatan tahun 2024 tetap dilanjutkan pada tahun 2025 agar pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026 dapat dicapai lebih optimal di akhir tahun perencanaan.

2.4. Review terhadap rancangan RKPD

Review terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah. Review ini dapat dilihat pada Table.9 (T-C.31) berikut ini:

Tabel 2.6 (T-C.31) Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2025 Kota Jambi

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							14.269.585.000
	A. URUSAN PERENCANAAN							13.622.506.064
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP BAPPEDA (Dengan Satuan:Nilai)	A	10.944.790.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP BAPPEDA (Dengan Satuan:Nilai)	89	11.525.083.501
1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Dengan Satuan: Persen)</i>	100%	467.000.000	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Dengan Satuan: Persen)</i>	100%	371.707.428
1	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	6	82.000.000	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	6	68.929.359
2	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:</i>	3	385.000.000	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:</i>	3	302.778.069

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
		<i>Laporan)</i>				<i>Laporan)</i>		
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan (Dengan Satuan: Persen)	100%	6.980.790.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan (Dengan Satuan: Persen)	100%	7.495.172.829
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: org/bln)	57	6.540.040.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: org/bln)	57	7.048.387.576
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	12	385.750.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	8	404.553.367
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	2	55.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	2	42.231.886

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	4		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	-	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	49.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	43.362.350
1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	49.000.000	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	43.362.350
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Persen)	100%	422.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Persen)	100%	349.755.960
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	3	110.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	3	117.105.000
2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Dokumen)	3	116.000.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Dokumen)	3	82.150.960

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat (Dengan Satuan: Orang)	40	63.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat (Dengan Satuan: Orang)	20	50.500.000
4	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Peraturan PerUU (Dengan Satuan: Orang)	40	133.000.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Peraturan PerUU (Dengan Satuan: Orang)	20	100.000.000
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum (Dengan Satuan: Persen)	100%	1.195.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum (Dengan Satuan: Persen)	100%	1.272.873.994
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	78.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	73.050.587
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	5	215.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	5	483.111.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	6	229.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	6	191.279.168
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	42.435.300

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan: Laporan)	1	43.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan: Laporan)	1	39.343.950
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	535.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	427.000.000
7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	45.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	16.653.989
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	455.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	255.000.000
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	1	285.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	1	-
2					Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	255.000.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	14	170.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	14	-
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	659.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	561.680.940
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan: Laporan)	1	27.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan: Laporan)	1	24.408.540
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dengan Satuan: Laporan)	1	360.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dengan Satuan: Laporan)	1	338.000.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	1	110.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	1	70.000.000
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	1	162.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	1	129.272.400

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	717.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	1.175.530.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan: Unit)	22	335.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan: Unit)	22	217.390.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	8	75.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	8	69.020.000
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	75	86.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	75	85.650.000
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	3	65.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	3	60.000.000
5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diherabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	3	110.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diherabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	3	663.000.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
6	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diherabilitasi (Dengan Satuan: Unit)</i>	33	46.000.000	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diherabilitasi (Dengan Satuan: Unit)</i>	33	80.470.000
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (Dengan Satuan: Persen)	100%	1.212.000.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (Dengan Satuan: Persen)	100%	1.141.633.751
9	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (Dengan Satuan: Dokumen)	2	752.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (Dengan Satuan: Dokumen)	6	730.521.306
1	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Berita Acara)</i>	1	402.000.000	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Berita Acara)</i>	1	402.011.898
2	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	6	350.000.000	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	6	328.509.408

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
10	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	2	230.000.000	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	2	190.000.000
1	<i>Sub Kegiatan Analisis dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	2	230.000.000	<i>Sub Kegiatan Analisis dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	2	190.000.000
2	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Dengan Satuan: Dokumen)	0	0	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Dengan Satuan: Dokumen)	-	
11	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	2	230.000.000	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	4	221.112.445
1	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan)</i>	4	30.000.000	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan)</i>	1	30.010.215

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
2	<i>Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Dengan Satuan: Laporan)</i>	2	200.000.000	<i>Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Dengan Satuan: Laporan)</i>	3	191.102.230
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH PADA KOMPONEN PERENCANAAN & PENGUKURAN KINERJA (Dengan Satuan: Angka)	26,11 & 17,93	1.461.000.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH PADA KOMPONEN PERENCANAAN & PENGUKURAN KINERJA (Dengan Satuan: Angka)	25,77 & 19,77	955.788.812
12	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Angka)</i>	26,82 & 18,64	670.100.000	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Angka)</i>	25,79 & 23,01	460.980.269
1	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	2	170.100.000	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	2	94.835.131

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
2	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	4	500.000.000	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	4	366.145.138
13	Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Angka)	26,99 & 18,32	410.900.000	Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Angka)	26,99 & 18,57	229.238.619
1	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	6	155.000.000	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	2	140.999.763

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	-	127.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	-	
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	103.900.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	88.238.856
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	2	25.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	-	
14	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan	24,52 &	380.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan	24,52 &	265.569.924

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
		Kewilayahan (Dengan Satuan: Angka)	16,82			Kewilayahan (Dengan Satuan: Angka)	17,07	
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	380.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	265.569.924
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	5	0	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	-	
B. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				739.000.000	B. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
IV.	PROGRAM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN (Dengan Satuan: Persen)	100%	739.000.000	PROGRAM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN (Dengan Satuan: Persen)	100%	647.078.936

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
15	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	Rekomendasi hasil kajian bidang bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan (Dengan Satuan: Dokumen)	2	185.000.000	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	Persentase Hasil Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	144.731.769
1	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan: Laporan)</i>	2	185.000.000	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan: Laporan)</i>	2	144.731.769
	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2	105.000.000	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	-	
16	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	Rekomendasi hasil kajian bidang sosial budaya dan kependudukan (Dengan Satuan: Rekomendasi)	2	105.000.000	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang sosial budaya dan kependudukan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan (Dengan Satuan: Persen)	100%	107.007.635

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dengan Satuan: Dokumen)	2	105.000.000	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dengan Satuan: Dokumen)	2	107.007.635
17	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rekomendasi hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan (Dengan Satuan: Rekomendasi)	2	114.000.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Rekomendasi kajian bidang ekonomi dan pembangunan (Dengan Satuan: Persen)	100%	96.249.749
1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dengan Satuan: Dokumen)	1	57.000.000	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dengan Satuan: Dokumen)	1	47.749.855
2	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dengan Satuan: Dokumen)	1	57.000.000	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pekerjaan Umum (Dengan Satuan: Dokumen)	1	48.499.894
18	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah (Dengan Satuan: Angka)	62,75	335.000.000	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah (Dengan Satuan: Angka)	62,75	299.089.783

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	<i>Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	1	120.000.000	<i>Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	1	110.649.949
2	<i>Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Dengan Satuan: Laporan)</i>	1	165.000.000	<i>Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Dengan Satuan: Laporan)</i>	1	188.439.834

Dari hasil review yang disajikan dalam Tabel 2.6 (T-C.31) diatas, terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Jambi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2025 terjadi pergeseran beberapa anggaran dan terdapat perubahan anggaran antara Rancangan Awal RKPD 2025 dengan analisis hasil kebutuhan, dimana terjadi pengurangan jumlah anggaran sebesar Rp 87.205.000.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, sampai ke Musrenbang Kota, maupun dalam pembahasan yang didiskusikan pada Forum Perangkat Daerah Bappeda, tidak ada usulan program/kegiatan baik dari kelompok masyarakat, DPRD Kota Jambi, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, *stakeholder*, maupun perangkat daerah lainnya yang ditujukan untuk dimasukkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Jambi Tahun 2025, Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan. Dengan demikian, dikarenakan tidak ada usulan-usulan sebagaimana tersebut diatas, maka Tabel T-C.32 mengenai usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan sebagaimana Permendagri 86 Tahun 2017, tidak ditampilkan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 menjadi tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Tahapan penyusunan RPJMN 2025-2029 yang dimulai dari rancangan Teknokratik sejak Juni 2023-Januari 2024. Adapun agenda pembangunan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan Perkuatan Fondasi Transformasi yaitu :

1. Transformasi Sosial : Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial
2. Transformasi Ekonomi : Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3. Transformasi Tata Kelola : Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
4. Supermasi hukum, Satbilas dan Kepemimpinan Indonesia : memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gantar kawasan dan ketangguhan diplomasi
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi : Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 bahwa arah kebijakan pembangunan Wilayah Sumatra berfokus pada penuntasan masalah kemiskinan khususnya wilayah 3T, konektivitas antar daerah, dan sektor yang akan dikembangkan ke depan adalah modernisasi sektor pertanian dan pengembangan sistematis ketenagalistrikan.

Oleh karena itu, Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 menjadikan arah pembangunan wilayah pulau Sumatera adalah sebagai mata rantai

utama bioindustri dan kemaritiman berdaya saing dan berkelanjutan, dimana Provinsi Jambi sebagai Penyangga bioindustri dan ketahanan energi Sumatera. Dengan *highlight* Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi dalam mendukung Tema Pembangunan Penyangga bioindustri dan ketahanan energi Sumatera tersebut antara lain:

1. Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan bioindustri (*pilot project*: Universitas Jambi)
2. Pengembangan hilirisasi bioindustri dan hilirisasi batubara pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim Palembang-Jambi;
3. Lanjutan pembangunan tol Trans Sumatra ruas Palembang-Jambi dan Pekanbaru-Jambi;
4. Pembangunan pembangkit listrik terbarukan berbasis hidro dan panas bumi (PLTA Merangin dan PLTP Sungai Penuh) dan interkoneksi Sumatera
5. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jambi yang profesional dan bebas korupsi.
6. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah
7. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis dan peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami, termasuk pengamanan terhadap lahan gambut melalui pembangunan sistem irigasi rawa;
8. Akselerasi pemanfaatan sumber daya EBT sebagai sumber pembangkitan tenaga Listrik (potensi dari biomassa kelapa sawit);
9. Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Merangin serta pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan air.

Sebagai sebuah institusi perencana pembangunan daerah, tentunya Bappeda Kota Jambi harus menyikapi kebijakan nasional secara global dalam untuk diharmonissikan dengan perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, terlebih lagi arah kebijakan pembangunan wilayah pulau Sumatera dan kebijakan pembangunan Provinsi Jambi sebagai Penyangga bioindustri dan ketahanan energi Sumatera.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam Renstra Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026 dirumuskan tujuan dan sasaran. Adapun Tujuannya adalah “Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan”, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP) dengan target sebesar 83,08 dengan kategori “Sangat Baik”. Definisi operasional dari IKPP ini adalah Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD dikali 20%, ditambah akumulasi realisasi SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinerja di bagi jumlah bobot komponen perencanaan dan pengukuran kinerja yang ditetapkan KEMENPAN-RB, dikali 60%, kemudian ditambah persentase Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar

perumusan kebijakan dikali 20%, atau jika diformulasikan adalah sebagai berikut:

$$\text{IKPP} = \left(\frac{\% \text{ Realisasi Sasaran RPJMD}}{\% \text{ Target Sasaran RPJMD}} \right) \times 20\% + \left(\frac{\text{Realisasi SAKIP Kota Komponen Perencanaan} + \text{Realisasi SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja}}{\Sigma \text{ Bobot Nilai SAKIP Komponen Perencanaan} + \text{Pengukuran Kinerja}} \right) \times 60\% + \left(\frac{\% \text{ Realisasi hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}}{\% \text{ Target hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}} \right) \times 20\%$$

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka sasaran kinerja yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan organisasi adalah :

1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan, dengan indikator sasaran kinerja yang ditargetkan tahun 2025 yaitu Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja 23,21 dan Nilai SAKIP Kota untuk Komponen Pengukuran Kinerja 19,43. Definisi operasional untuk indikator ini adalah Nilai evaluasi SAKIP Kota pada komponen Perencanaan Kinerja dan komonen Pengukuran Kinerja yang dikakukan oleh KEMENPAN RB tahun-n;

Hasil Evaluasi SAKIP Kota Jambi pada
Komponen Perencanaan
dari KementerianPAN-RB pada Tahun-n

dan

Hasil Evaluasi SAKIP Kota Jambi pada
Komponen Pengukuran Kinerja
dari KementerianPAN-RB pada Tahun-n

2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan, dengan indikator kinerja yaitu Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD. Definisi operasionalnya adalah Persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran yang sudah di rilis dikali 100%, atau jika diformulasikan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ Capaian Seluruh Indikator Kinerja Sasaran RPJMD}}{\Sigma \text{ Indikator Sasaran yang sudah di rilis}} \times 100\%$$

3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang Dalam Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan, dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian}} \times 100\%$$

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi mengemban 2 (dua) urusan penunjang yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitain dan Pengembangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan berbagai pertimbangan melakukan simplifikasi program dan kegiatan yang ada dalam Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengendalian pencapaian target kinerja RPJMD, **Program Perencanaan,**

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menjadi pilihan pertama untuk mewujudkan kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah dengan sasaran Rencana Pemerintah Daerah (RPD). Indikator program ini adalah Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD dengan target 100 persen.

$$\frac{\% \text{ Capaian Seluruh Indikator Kinerja Sasaran RPJMD}}{\Sigma \text{ Indikator Sasaran yang sudah di rilis}} \times 100\%$$

Program ini dilaksanakan oleh Bidang **Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**.

2. Sebagaimana *cascade* kinerja BAPPEDA Kota Jambi untuk mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK, dengan indikator Nilai SAKIP Kota Jambi dengan target pada tahun 2025 adalah nilai BB, **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** dipilih untuk meningkatkan pencapaian kinerja perencanaan pembangunan, dengan indikator program adalah nilai SAKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Jambi.

$$\frac{\Sigma \text{ Perolehan Nilai SAKIP seluruh Perangkat Daerah Komponen Perencanaan}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah}}$$

dan

$$\frac{\Sigma \text{ Perolehan Nilai SAKIP seluruh Perangkat Daerah Komponen Pengukuran Kinerja}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah Mitra}}$$

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dan Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur (PSI).

3. Selanjutnya, untuk menganalisis isu permasalahan atau kebijakan/peraturan maupun dalam rangka meningkatkan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, maka Bidang Litbang melaksanakan **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** dipilih dengan indikator program adalah Persentase hasil kajian yang

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian}} \times 100\%$$

direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan, dengan target capaian 100%.

4. Sedangkan untuk mendukung 3 program utama tersebut juga di topang dengan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan oleh Sekretariat Perangkat Daerah.

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Jambi melaksanakan 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Pada tahun 2025, Bappeda Kota Jambi direncanakan akan melaksanakan 4 (empat) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan beserta kebutuhan dana Bappeda Kota Jambi Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai mana Tabel.3.1 (T-C.33) berikut:

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	01	01	2.0 2	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	8 Dokumen	404.553.367,00	PAD	-	8 Dokumen	410.000.000,00
5	01	01	2.0 2	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Jambi	2 Dokumen	42.231.886,00	PAD	-	2 Dokumen	55.000.000,00
5	01	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100persen	43.362.350,00		-	100persen	50.000.000,00
5	01	01	2.0 3	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen	43.362.350,00	PAD	-	1 Dokumen	50.000.000,00
5	01	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100persen	349.755.960,00		-	100persen	445.000.000,00
5	01	01	2.0 5	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	3 Paket	117.105.000,00	PAD	-	3 Paket	130.000.000,00
5	01	01	2.0 5	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Jambi	3 Dokumen	82.150.960,00	PAD	-	3 Dokumen	117.000.000,00
5	01	01	2.0 5	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Jambi	20 Orang	50.500.000,00	PAD	-	20 Orang	64.000.000,00
5	01	01	2.0 5	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jambi	20 Orang	100.000.000,00	PAD	-	20 Orang	134.000.000,00
5	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum		100 Persen	1.272.873.994,00		-	100persen	1.206.000.000,00
5	01	01	2.0 6	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kota Jambi	1 Paket	73.050.587,00	PAD	-	1 Paket	79.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
					Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan							
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	8 Paket	483.111.000,00	PAD	-	5 Paket	216.000.000,00
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	6 Paket	167.000.000,00	PAD	-	6 Paket	230.000.000,00
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Jambi	1 Paket	42.435.300,00	PAD	-	1 Paket	51.000.000,00
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	1 Laporan	39.343.950,00	PAD	-	1 Laporan	44.000.000,00
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	1 Laporan	427.000.000,00	PAD	-	1 Laporan	540.000.000,00
5	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen	16.653.989,00	PAD	-	1 Dokumen	46.000.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah		100persen	255.000.000,00		-	100persen	590.000.000,00
5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Jambi	1 Unit	0,00	PAD	-		0,00
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Jambi	1 Paket	255.000.000,00	PAD	-	1 Paket	400.000.000,00
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Jambi	14 Unit	0,00	PAD	-	17 Unit	190.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100persen	561.680.940,00		-	100persen	681.000.000,00
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	1 Laporan	24.408.540,00	PAD	-	1 Laporan	28.000.000,00
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Jambi	1 Laporan	338.000.000,00	PAD	-	1 Laporan	370.000.000,00
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	1 Laporan	70.000.000,00	PAD	-	1 Laporan	120.000.000,00
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	1 Laporan	129.272.400,00	PAD	-	1 Laporan	163.000.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100persen	1.175.530.000,00		-	100 persen	746.000.000,00
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Jambi	23 Unit	217.390.000,00	PAD	-	23 Unit	340.000.000,00
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Jambi	7 Unit	69.020.000,00	PAD	-	8 Unit	80.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
	01	01	2.0 9	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Jambi	75 Unit	85.650.000,00	PAD	-	75 Unit	88.000.000,00
5	01	01	2.0 9	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Jambi	3 Unit	60.000.000,00	PAD	-	3 Unit	70.000.000,00
5	01	01	2.0 9	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Jambi	2 Unit	663.000.000,00	PAD	-	3 Unit	120.000.000,00
5	01	01	2.0 9	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Jambi	33 Unit	80.470.000,00	PAD	-	33 Unit	48.000.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		100 persen	1.141.633.751,00			100 persen	1.220.000.000,00
5	01	02	2.0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Daerah		100 persen	730.521.306,00		-	100 persen	740.000.000,00
5	01	02	2.0 1	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kab./Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab./Kota	Kota Jambi	1 Berita Acara	402.011.898,00	PAD	-	1 Berita Acara	410.000.000,00
5	01	02	2.0 1	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Jambi	6 Dokumen	328.509.408,00	PAD	-	2 Dokumen	330.000.000,00
5	01	02	2.0 2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data Pembangunan		100 persen	190.000.000,00		-	2 Dokumen	250.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	01	02	2.0 2	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Jambi	2 Dokumen	190.000.000,00	PAD	-	2 Dokumen	250.000.000,00
5	01	02	2.0 3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Evaluasi Perangkat Daerah		100 persen	221.112.445,00		-	2 Dokumen	230.000.000,00
5	01	02	2.0 3	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab./Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Jambi	1 Laporan	30.010.215,00	PAD	-	4 Laporan	30.000.000,00
5	01	02	2.0 3	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Jambi	3 Laporan	191.102.230,00	PAD	-	3 Laporan	200.000.000,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH PADA KOMOPNEN PERENCANAAN DAN PENGUKURAN KINERJA		25,77 & 19,55	955.788.812,00			25,98 & 18,71	1.401.000.000,00
5	01	03	2.0 1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		25,79 & 23,01	460.980.269,00		-	26,30 & 20,00	681.000.000,00
5	01	03	2.0 1	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pemerintahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Kota Jambi	2 Dokumen	94.835.131,00	PAD	-	2 Dokumen	181.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.0 1	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD & RKPD)	Kota Jambi	4 Dokumen	366.145.138,00	PAD	-	4 Dokumen	500.000.000,00
5	01	03	2.0 2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian & SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA		26,99 & 18,57	229.238.619,00		-	27,05 & 18,82	290.000.000,00
5	01	03	2.0 2	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kota Jambi	2 Dokumen	140.999.763,00	PAD	-	6 Dokumen	180.000.000,00
5	01	03	2.0 2	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD & RKPD)	Kota Jambi	2 Dokumen	88.238.856,00	PAD	-	2 Dokumen	110.000.000,00
5	01	03	2.0 3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		24,52 & 17,07	265.569.924,00		-	24,58 & 17,32	430.000.000,00
5	01	03	2.0 3	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD. RPJMD & RKPD)	Kota Jambi	2 Dokumen	265.569.924,00	PAD	-	5 Dokumen	430.000.000,00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				647.078.936,00				750.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN		100persen	647.078.936,00			100 persen	750.000.000,00
5	05	02	2.0 1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah		100persen	144.731.769,00		-	100persen	185.000.000,00
5	05	02	2.0 1	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kota Jambi	2 Laporan	144.731.769,00	PAD	-	2 Laporan	185.000.000,00
5	05	02	2.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang sosial budaya dan kependudukan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan		100persen	107.007.635,00		-	100 persen	110.000.000,00
5	05	02	2.0 2	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Jambi	2 Dokumen	107.007.635,00	PAD	-	2 Dokumen	110.000.000,00
5	05	02	2.0 3		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang ekonomi dan pembangunan sebagai dasar perumusan kebijakan		100persen	96.249.749,00		-	100 persen	120.000.000,00
5	05	02	2.0 3	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Jambi	1 Dokumen	47.749.855,00	PAD	-	1 Dokumen	60.000.000,00
5	05	02	2.0 3	0012	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Jambi	1 Dokumen	48.499.894,00	PAD	-	1 Dokumen	60.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
5	05	02	2.0 4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah		63	299.089.783,00		-	63,25	335.000.000,00
5	05	02	2.0 4	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Jambi	1 Dokumen	110.649.949,00	PAD	-	1 Dokumen	120.000.000,00
5	05	02	2.0 4	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kota Jambi	1 Laporan	188.439.834,00	PAD	-	1 Laporan	215.000.000,00
J U M L A H								14.269.585.000,00					14.919.100.000,00

Berdasarkan Tabel 3.1 (T-C.33) diatas, terdapat 4 Program dan 18 kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp.14.269.585.000,-. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan pagu indikatif lebih besar dari Tahun Anggaran 2025, yakni sebesar Rp.14.919.100.000,- .

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan berbagai isu-isu penting yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, dalam menopang misi pemerintah daerah yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi dengan Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK dengan indikator sasaran meningkatnya nilai SAKIP.

Untuk Tahun 2025, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Jambi 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		%
			Target Capaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			14.269.585.000,00	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			14.269.585.000,00	
A.	PERENCANAAN			13.622.506.064,00	95,47
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BAPPEDA	89	11.525.083.501,00	80,77
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100 persen	371.707.428,00	2,60
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	68.929.359,00	0,48
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	302.778.069,00	2,12
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100persen	7.495.172.829,00	52,53

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		%
			Target Capaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	7.048.387.576,00	49,39
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	404.553.367,00	2,84
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	42.231.886,00	0,30
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100persen	43.362.350,00	0,30
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	43.362.350,00	0,30
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100persen	349.755.960,00	2,45
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	117.105.000,00	0,82
1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Adm.i Kepegawaian	3 Dokumen	82.150.960,00	0,58
1.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	50.500.000,00	0,35
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	100.000.000,00	0,70
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	100 Persen	1.272.873.994,00	8,92
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.050.587,00	0,51
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	483.111.000,00	3,39
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	167.000.000,00	1,34
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yg Disediakan	1 Paket	42.435.300,00	0,30
1.5.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	39.343.950,00	0,28
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	427.000.000,00	0,299
1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	16.653.989,00	0,12
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100persen	255.000.000,00	1,79

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		%
			Target Capaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00
1.6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yg Disediakan	1 Paket	255.000.000,00	1,79
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100persen	561.680.940,00	3,94
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.408.540,00	0,17
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	338.000.000,00	2,37
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000,00	0,49
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	129.272.400,00	0,91
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100persen	1.175.530.000,00	8,24
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	217.390.000,00	1,52
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	69.020.000,00	0,48
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	85.650.000,00	0,60
1.8.4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	60.000.000,00	0,42
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	663.000.000,00	4,65
1.8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	80.470.000,00	0,56
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100 persen	1.141.633.751,00	8,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		%
			Target Capaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Daerah	100 persen	730.521.306,00	5,12
2.1.1	Pelaksanaan Musrenbang Kab./Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab./Kota	1 Berita Acara	402.011.898,00	2,82
2.1.2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	328.509.408,00	2,30
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data Pembangunan	100 persen	190.000.000,00	1,33
2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	190.000.000,00	1,33
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	221.112.445,00	1,55
2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	30.010.215,00	0,21
2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	191.102.230,00	1,34
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH PADA KOMOPNEN PERENCANAAN DAN PENGUKURAN KINERJA	25,77 & 19,55	955.788.812,00	6,70
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	25,79 & 23,01	460.980.269,00	3,23
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pemerintahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pemerintahan yg dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD & RKPD)	2 Dokumen	94.835.131,00	0,66
3.1.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD & RKPD)	4 Dokumen	366.145.138,00	2,57
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA	26,99 & 18,57	229.238.619,00	1,61

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		%
			Target Capaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPd)	2 Dokumen	140.999.763,00	0,99
3.2.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yg dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD & RKPd)	2 Dokumen	88.238.856,00	0,62
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Wilayah	24,52 & 17,07	265.569.924,00	1,86
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Infrastruktur yg dikoordinir penyusunannya (RPJPD. RPJMD & RKPd)	2 Dokumen	265.569.924,00	1,86
B.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			647.078.936,00	4,53
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN	100persen	647.078.936,00	4,53
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah	100persen	144.731.769,00	1,01
4.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Laporan	144.731.769,00	1,01
4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang sosial budaya dan kependudukan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	100persen	107.007.635,00	0,75
4.2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	107.007.635,00	0,75
4.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang ekonomi dan pembangunan sebagai dasar perumusan kebijakan	100persen	96.249.749,00	0,67
4.3.1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	47.749.855,00	0,33

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		%
			Target Capaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
4.3.2	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	48.499.894,00	0,34
4.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah	63	299.089.783,00	2,10
4.4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	110.649.949,00	0,78
4.4.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	188.439.834,00	1,32
				14.269.585.000,00	100,00

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2025 untuk Bappeda Kota Jambi total sebesar Rp 14.269.585.000,- terdiri dari Rp 7.221.197.424,- bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebesar Rp 7.048.387.576,- untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Adapun kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2025 tersebut digunakan untuk melaksanakan :

1. Urusan Perencanaan, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 kegiatan dan 30 sub kegiatan membutuhkan anggaran sebesar Rp 11.525.083.501,- atau 80,77% dari total anggaran belanja terbesar yaitu untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebanyak 49,39%. Adapun indikator Program ini yaitu nilai SAKIP Bappeda Kota Jambi yang ditargetkan mendapat nilai 89. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bappeda Kota Jambi;
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan membutuhkan anggaran sebesar Rp 1.141.633.751,- atau 8,00% dari total anggaran. Adapun indikator Program ini yaitu persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah yang ditargetkan

tercapai 100%. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah;

- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan membutuhkan anggaran sebesar Rp 955.788.812,- atau 6,70% dari total anggaran. Adapun indikator Program ini yaitu nilai SAKIP perangkat daerah pada komponen perencanaan dengan target nilai 25,79 dan komponen pengukuran kinerja dengan target nilai 19,55. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur; dan
2. Urusan Penelitian dan Pengembangan, yaitu: Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan membutuhkan anggaran sebesar Rp 647.078.936,- atau 4,53% dari total anggaran. Adapun indikator Program ini yaitu persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan yang ditargetkan 100 persen. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah yang dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah, dan Selanjutnya Rancangan Renja tersebut disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2025 ini telah disempurnakan berdasarkan hasil atau berita acara Forum Perangkat Daerah tanggal 07 Maret 2024. Selain untuk penyusunan RKPD Kota Jambi, Renja ini juga sebagai cikal bakal penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat penyusunan RKA dengan tetap memperhatikan Tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2025.

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2025 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 dan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Jambi 2024-2026.

Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025. Apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dibuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Mengingat dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024 maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda Kota Jambi secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a) Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b) Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berada dalam lingkup Bappeda Kota Jambi berkewajiban menjamin konsistensi penyusunan RKA Tahun 2025 dengan berpedoman pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2025.
3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan, pengendalian dan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.
4. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 ini juga digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan indikator dan target kinerja.

Mei 2024
KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI



SUHENDRI, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700404 199601 1 002

**POHON KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI
TAHUN 2025**

Ultimate Outcome Daerah	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK																																																		
	Nilai SAKIP Target 2025 : A																																																		
Ultimate Outcome BAPPEDA	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan																																																		
	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP) Target 2025 : 83,08																																																		
Outcomes	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan				Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan				Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah				Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Bappeda																																						
	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja Target 2025 : 23,21		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja Target 2025 : 19,43		Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD Target 2025 : 100%				Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan Target 2025 : 100%				Predikat Capaian AKIP Bappeda 2025 : A (Memuaskan)																																						
Intermediate Outcome	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Target 2025 : 25,77 & 19,55				Mewujudkan kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah Target 2025 : 100%				Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti untuk perumusan kebijakan Target 2025 : 100%				Nilai AKIP Bappeda 2025 : 89																																						
	<table border="1"> <tr> <td>Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan : Angka)</td> <td>Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Dengan Satuan : Angka)</td> <td>Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan : Angka)</td> <td>Mewujudkan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang tepat Waktu (Dengan Satuan : Persen)</td> <td>Mewujudkan ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Persen)</td> <td>Mewujudkan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat Waktu (Dengan Satuan : Persen)</td> <td>Meningkatkan Persentase Hasil Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah (Dengan Satuan : Persen)</td> <td>Meningkatkan Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang sosial budaya dan pembangunan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan (Dengan Satuan : Persen)</td> <td>Meningkatkan Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang ekonomi dan pembangunan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan (Dengan Satuan : Persen)</td> <td>Meningkatkan Nilai Indeks Inovasi Daerah (Dengan Satuan : Nilai Angka)</td> <td>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda (Dengan Satuan : Nilai)</td> <td>Mengoptimalkan tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Persen)</td> <td>Mengoptimalkan tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Persen)</td> <td>Mengoptimalkan tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Persen)</td> <td>Mengoptimalkan tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Persen)</td> <td>Mengoptimalkan tertib Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan : Persen)</td> <td>Mengoptimalkan tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Persen)</td> <td>Mengoptimalkan tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan : Persen)</td> </tr> <tr> <td>Tgt 2025 : 25,79 & 23,01</td> <td>Tgt 2025 : 26,99 & 18,57</td> <td>Tgt 2025 : 24,52 & 17,07</td> <td>Tgt 2025 : 100%</td> <td>Tgt 2025 : 100%</td> <td>Tgt 2025 : 100%</td> <td>Tgt 2025 : 100%</td> <td>Tgt 2025 : 100%</td> <td>Tgt 2025 : 100%</td> <td>Tgt 2025 : 63,00</td> <td>Target 2025 : 80,70</td> <td>Target 2025 : 100%</td> <td>Target 2025 : 100%</td> <td>Target 2025 : 100%</td> <td>Target 2025 : 100%</td> <td>Target 2025 : 100%</td> <td>Target 2025 : 100%</td> </tr> </table>																	Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan : Angka)	Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Dengan Satuan : Angka)	Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan : Angka)	Mewujudkan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang tepat Waktu (Dengan Satuan : Persen)	Mewujudkan ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Persen)	Mewujudkan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat Waktu (Dengan Satuan : Persen)	Meningkatkan Persentase Hasil Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah (Dengan Satuan : Persen)	Meningkatkan Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang sosial budaya dan pembangunan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan (Dengan Satuan : Persen)	Meningkatkan Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang ekonomi dan pembangunan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan (Dengan Satuan : Persen)	Meningkatkan Nilai Indeks Inovasi Daerah (Dengan Satuan : Nilai Angka)	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda (Dengan Satuan : Nilai)	Mengoptimalkan tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Persen)	Mengoptimalkan tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Persen)	Mengoptimalkan tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Persen)	Mengoptimalkan tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Persen)	Mengoptimalkan tertib Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan : Persen)	Mengoptimalkan tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Persen)	Mengoptimalkan tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan : Persen)	Tgt 2025 : 25,79 & 23,01	Tgt 2025 : 26,99 & 18,57	Tgt 2025 : 24,52 & 17,07	Tgt 2025 : 100%	Tgt 2025 : 100%	Tgt 2025 : 100%	Tgt 2025 : 100%	Tgt 2025 : 100%	Tgt 2025 : 100%	Tgt 2025 : 63,00	Target 2025 : 80,70	Target 2025 : 100%	Target 2025 : 100%	Target 2025 : 100%	Target 2025 : 100%	Target 2025 : 100%
Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan : Angka)	Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Dengan Satuan : Angka)	Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan : Angka)	Mewujudkan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang tepat Waktu (Dengan Satuan : Persen)	Mewujudkan ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Persen)	Mewujudkan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat Waktu (Dengan Satuan : Persen)	Meningkatkan Persentase Hasil Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah (Dengan Satuan : Persen)	Meningkatkan Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang sosial budaya dan pembangunan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan (Dengan Satuan : Persen)	Meningkatkan Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang ekonomi dan pembangunan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan (Dengan Satuan : Persen)	Meningkatkan Nilai Indeks Inovasi Daerah (Dengan Satuan : Nilai Angka)	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda (Dengan Satuan : Nilai)	Mengoptimalkan tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Persen)	Mengoptimalkan tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Persen)	Mengoptimalkan tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Persen)	Mengoptimalkan tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Persen)	Mengoptimalkan tertib Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan : Persen)	Mengoptimalkan tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Persen)	Mengoptimalkan tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan : Persen)																																		
Tgt 2025 : 25,79 & 23,01	Tgt 2025 : 26,99 & 18,57	Tgt 2025 : 24,52 & 17,07	Tgt 2025 : 100%	Tgt 2025 : 100%	Tgt 2025 : 100%	Tgt 2025 : 100%	Tgt 2025 : 100%	Tgt 2025 : 100%	Tgt 2025 : 63,00	Target 2025 : 80,70	Target 2025 : 100%	Target 2025 : 100%	Target 2025 : 100%	Target 2025 : 100%	Target 2025 : 100%	Target 2025 : 100%																																			
Intermediate Outcome	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan : Dokumen)	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan : Dokumen)	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan : Dokumen)	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota (Dengan Satuan : Berita Acara)	Teriputnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (Dengan Satuan : Laporan)	Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan : Laporan)	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dengan Satuan : Dokumen)	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dengan Satuan : Dokumen)	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: org/bn)	Terlaksananya penyusunan Dokumen Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	Terlaksananya penyediaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	Terlaksananya penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dengan Satuan: Paket)	Terlaksananya Pengadaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan (Dengan Satuan: Unit)	Terlaksananya penyusunan Laporan Surat Menyurat (Dengan Satuan: Laporan)	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan (Dengan Satuan: Unit)																																	
	Tgt 2025 : 2	Tgt 2025 : 6	Tgt 2025 : 5	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 2	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 6	Tgt 2025 : 57	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 3	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 22																																		
Output	Terkoordinirnya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan : Dokumen)	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan : Dokumen)	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja pada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	Ditertapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan : Dokumen)	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	Terkelolanya Data Kelembagaan dan Peraturan dengan baik (Dengan Satuan : Laporan)	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dengan Satuan : Dokumen)	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif (Dengan Satuan : Laporan)	Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	Terlaksananya penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	Terlaksananya penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dengan Satuan: Paket)	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dengan Satuan: Unit)	Terlaksananya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dengan Satuan: Paket)	Terlaksananya Pengadaan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dengan Satuan: Laporan)	Terlaksananya penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dengan Satuan: Unit)																																	
	Tgt 2025 : 4	Tgt 2025 : 2	Tgt 2025 : -	Tgt 2025 : 6	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 3	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 3	Tgt 2025 : 8	Tgt 2025 : 2	Tgt 2025 : 5	Tgt 2025 : 14	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 75	Tgt 2025 : 8																																		
Output	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja pada Perangkat Daerah Bidang SDA (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)										Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	Terlaksananya penyediaan Bimbit bagi Pegawai (Dengan Satuan: Orang)	Terlaksananya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dengan Satuan: Paket)	Terlaksananya penyediaan Asat Tetap Lainnya (Dengan Satuan: Laporan)	Terlaksananya penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	Terlaksananya penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	Terlaksananya Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya (Dengan Satuan: Unit)																																		
	Tgt.2024 : 2										Tgt.2024 : 0	Tgt 2025 : 20	Tgt.2024 : 1	Tgt.2024 : 20	Tgt.2024 : 1	Tgt.2024 : 1	Tgt 2025 : 33																																		
Output	Terlaksananya Penyusunan Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan: Laporan)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penatausahaan Ansjp Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)								Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	Terlaksananya penyediaan Bimbit bagi Pegawai (Dengan Satuan: Orang)	Terlaksananya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dengan Satuan: Paket)	Terlaksananya penyediaan Asat Tetap Lainnya (Dengan Satuan: Laporan)	Terlaksananya penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	Terlaksananya penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	Terlaksananya Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya (Dengan Satuan: Unit)																																		
	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 1	Tgt 2025 : 1								Tgt.2024 : 0	Tgt 2025 : 20	Tgt.2024 : 1	Tgt.2024 : 20	Tgt.2024 : 1	Tgt.2024 : 1	Tgt 2025 : 33																																		

Kepala Daerah

Kepala BAPPEDA

Eselon III BAPPEDA

Eselon IV / J/T BAPPEDA

CASCADING KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025

Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK										Sasaran RPD
Nilai SAKIP Kota Jambi										
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan										Tujuan Renstra BAPPEDA
Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP) (Target 2025 : 83,08)										
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan			Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah					Sasaran Renstra BAPPEDA
Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja (Target 2025 : 23,21)	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja (Target 2025 : 19,43)	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD (Target 2025 : 100%)			Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan (Target 2025 : 100%)					
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Penelitian dan Pengembangan Daerah					Program
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Target 2025 : 25,77 & 19,55		Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah (Target 2025 : 100%)			Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan (Target 2025 : 100%)					
Rp955,788,812		Rp1,141,633,751			Rp647,078,936					
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kegiatan
Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Mewujudkan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang tepat Waktu	Mewujudkan ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Mewujudkan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat Waktu	Meningkatkan Persentase Hasil Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah	Meningkatkan Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang sosial budaya dan kependudukan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	Meningkatkan Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang ekonomi dan pembangunan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	Meningkatkan Nilai Indeks Inovasi Daerah	
Target 2025 : 25,79 & 23,01	Target 2025 : 26,99 & 18,57	Target 2025 : 24,52 & 17,07	Target 2025 : 100%	Target 2025 : 100%	Target 2025 : 100%	Target 2025 : 100%	Target 2025 : 100%	Target 2025 : 100%	Target 2025 : 63,00	
TA.2025 : Rp460,980,269	TA.2025 : Rp229,238,619	TA.2025 : Rp265,569,924	TA.2025 : Rp730,521,306	TA.2025 : Rp190,000,000	TA.2025 : Rp221,112,445	TA.2025 : Rp144,731,769	TA.2025 : Rp107,007,635	TA.2025 : Rp96,249,749	TA.2025 : Rp299,089,783	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Sub Kegiatan
Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Target : 2 Dokumen)	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Tertaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota (1 Berita Acara)	Terinputnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (1 Dokumen)	Tertaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (1 Laporan)	Tertaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Tertaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (2 Dokumen)	Tertaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (1 Dokumen)	Tertaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (1 Dokumen)	
TA.2025 : Rp94,835,131	TA.2025 : Rp140,999,763	TA.2025 : Rp265,569,924	TA.2025 : Rp402,011,898	TA.2025 Rp190,000,000	TA.2025 : Rp30,010,215	TA.2025 : Rp144,731,769	TA.2025 : Rp107,007,635	TA.2025 : Rp47,749,855	TA.2025 : Rp110,649,949	
Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	
Terkoordinirnya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (6 Dokumen)		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (1 Laporan)			Tertaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (1 Dokumen)	Tertaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	
TA.2025 : Rp366,145,138	TA.2025 : Rp88,238,856		TA.2025 : Rp328,509,408		TA.2025 : Rp191,102,230			TA.2025 : Rp48,499,894	TA.2025 : Rp188,439,834	
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur (PSI)		Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD)					Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)		Penanggung Jawab Kegiatan dan Sub Kegiatan